

REVITALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang)

Muhammad Sirojuddin¹, Nurul Umi Ati², Suyeno³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: Sirojuddin1811@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat vital dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan. Dalam kaitannya dengan ekonomi, pendidikan dapat dikatakan sebagai sebagai suatu aset dan investasi modal manusia (*human capital investment*). Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia agar dapat hidup lebih lama, lebih sehat, lebih berpengetahuan dan lebih berbudaya. Namun di pihak lain pendidikan dapat dipandang sebagai suatu status sosial ketimbang produktifitas suatu bangsa. Esensi pendidikan bagi suatu bangsa tidak saja menunjukkan tingkat peradabannya, tapi juga mencerminkan kualitas bangsanya sebagai manusia yang berdaulat, bermartabat, dan mampu berkompetisi baik pada tingkat regional, nasional, maupun Internasional. Kualitas bangsa tidak akan terlepas dari kualitas pendidikan, kesehatannya, kesejahteraan bahkan dari kualitas moralnya.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Revitalisasi

Pendahuluan

Esensi pendidikan bagi suatu bangsa tidak saja menunjukkan tingkat peradabannya, tapi juga mencerminkan kualitas bangsanya sebagai manusia yang berdaulat, bermartabat, dan mampu berkompetisi baik pada tingkat regional, nasional, maupun Internasional. Kualitas bangsa tidak akan terlepas dari kualitas pendidikan, kesehatannya, kesejahteraan bahkan dari kualitas moralnya. Untuk kepentingan pendidikan nasional, seyogyanya pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh segala pihak yang terkait dalam pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan dan mengevaluasi secara tepat dan benar.

Pendidikan dalam dalam perspektif kebijakan kita telah memiliki rumusan formal dan operasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yakni “ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah harus dipandang sebagai landasan dalam struktur sistem politik yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perancangan sistem politik demokratis, pemerintah daerah harus dipandang sebagai landasan kebijakan pendidikan nasional, karena berfungsi sebagai wahana yang vital pada tingkat tertentu untuk menjamin peningkatan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Parameter bagi pemerintah untuk suksesnya suatu pembangunan yaitu bagaimana pemerintah mampu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Problematika dalam pendidikan nasional ini merupakan suatu representasi dari berbagai daerah tertinggal khususnya di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang di wilayah Jawa Timur lebih tepatnya di Pulau Madura dimana dalam hal ini daerah tersebut masih di kategorikan daerah yang secara Sumber Daya Manusia (SDM) terbelang tradisional. Kabupaten Sampang dengan luas wilayah terdiri dari 14 Kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa.

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sampang mencapai 844.872 jiwa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Rendahnya pendidikan Kabupaten Sampang disebabkan karena tidak maksimalnya pendidikan dalam peningkatan kadar pengetahuan dan perilaku manusia. Pendidikan di Kabupaten Sampang saat ini sedang mengalami degradasi yang di buktikan dengan masih minimnya sekolah dasar hingga menengah di setiap Kecamatan. Munculnya degradasi tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh berbagai krisis multi dimensi yang kompleks dan tidak kunjung usai, yang meliputi krisis ekonomi, politik, dan moral.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi revitalisasi kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam revitalisasi kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang?

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Menurut Charles O. jenes dalam (Budi Winarno 2014:19) istilah kebijakan publik (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering di pertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standart*, proposal, dan *grand design*. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin keliatan sedikit abstrak atau mungkin dapat di pandang sebagai sesuatu yang “terjadi” terhadap seseorang.

Secara umum, Anderson dalam (Budi Winarno 2014:19) istilah “kebijakan” atau “*policy*” di gunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang tertentu. Masing-masing definisi tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan itu timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*).

Pendidikan

Istilah pendidikan jika diihat dalam bahasa inggris adalah “Education”, berasal dari bahsa latin educare yang diartikan pembimbingan

keberlanjutan (to lead forth). Maka dapat dikatakan secara etimologi adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia, secara teoritis, para ahli berpendapat pertama; bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran.

Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat kedua; bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih dalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kependidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.

Sedangkan, menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Fungsi pendidikan menjadi jalan alternatif untuk memberikan motivasi kepada anak didik agar mempunyai pemahaman tentang makna pendidikan yang sebenarnya. Motivasi tersebut berimplikasi positif terhadap upaya penumbuhan upaya tiga komponen yang merupakan landasan fundamental dalam memahami kebutuhan anak didik. Ketiga komponen tersebut menyangkut aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif (Muhammad Takdir Ilahi, 2012:31).

Kebijakan Pendidikan

Istilah “kebijakan pendidikan” merupakan terjemahan dari “education policy” yang berasal dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Sehingga Dr. Abd. Madjid (2018:9) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan.

Kebijakan yang dimaksud disini adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun suatu system pendidikan, sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang memuat perencanaan umu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Grantmakers for Education (2011:12), kerangka implementasi kebijakan pendidikan meliputi sepuluh tahap, yaitu:

1. Menentukan tujuan dan jangka waktu pencapaiannya,
2. Menentukan teori yang digunakan untuk mengusulkan suatu perubahan,
3. Mengidentifikasi sumberdaya dan strategi pertumbuhan sumberdaya yang berperan dalam kebijakan tersebut,
4. Melakukan penilaian kebutuhan,
5. Mengidentifikasi pemimpin utama dalam perumusan kebijakan,
6. Membuat sebuah rencana komunikasi,
7. Mengembangkan strategi politik yang akan digunakan,
8. Mengidentifikasi resiko kegagalan dan titik-titik yang rawan terjadi kegagalan,
9. Menentukan keberlanjutan, dan menentukan strategi akhir.

Revitalisasi

Pengertian revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum terberdaya atau tergunakan dengan baik. Maka revitalisasi dapat bermakna menjadikan perbuatan menjadi vital atau sangat penting dan sangat diperlukan, sehingga revitalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu hal yang krusial menjadi lebih terberdaya dan meningkatkan nilai vitalitasnya.

Budiono (2006) mengaitkan revitalisasi sebagai rangkaian upaya untuk menata kembali suatu kondisi pendidikan maupun budaya yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan vitalitas suatu daerah yang mengalami penurunan, agar daerah tersebut mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan. Vitalitas pendidikan adalah kualitas suatu pendidikan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya.

Revitalisasi pendidikan merupakan suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan siswa untuk menjadikan tanggungjawab dalam setiap perilakunya (Wibowo:2017). Dalam dunia pendidikan, revitalisasi menjadi agenda besar yang penting dioptimalisasikan secara integral. Hal ini menjadi penting karena revitalisasi pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya pemberdayaan yang memuat nilai-nilai universal sehingga berimplikasi positif bagi pendidikan di masa depan.

Upaya revitalisasi pendidikan akan berjalan optimal apabila orientasi dan signifikansi pendidikan tersebut berbasis nilai-nilai moral (moral values) (Rasidi Amir, 2003:57).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong peneliti yang menghasilkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:4) Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduktif), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifikasi), (Miles, Huberman dan Saldana:2014). Penulis lain juga mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya. Jadi dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan dan harus cukup valid untuk digunakan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Riyanto (2010:96) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Wawancara merupakan suatu pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu pada saat melakukan penelitian. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.

Pembahasan

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Kabupaten ini terletak pada 113°08' hingga 113°39' Bujur Timur dan 06°05' hingga 07°13' Lintang Selatan. Secara umum wilayah

Kabupaten Sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin/Pulau Kambing.

Kondisi pendidikan Kabupaten Sampang yang masih dirasa kurang guna mencetak generasi baru, menjadi salah satu alasan pemerintah daerah dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang harus mengupayakan berbagai upaya revitalisasi kebijakan pada sektor pendidikan. Dari temuan peneliti pada saat pengumpulan data dengan 3 informan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, temuan-temuan tersebut peneliti tulis untuk menjawab rumusan permasalahan dari judul revitalisasi kebijakan Pendidikan dan juga menggambarkan keadaan Pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang di bawah ini.

Bagaimana strategi revitalisasi kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan pemerintah menyelenggarakan pembaruan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik merupakan dampak dari tuntutan reformasi total.

Dampak reformasi pendidikan adalah melahirkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meliputi demokratisasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penghapusan diskriminasi, serta perbaikan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat juga menuntut adanya pembaruan sistem pendidikan agar sesuai dengan tuntutan global. Strategi Revitalisasi kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, diantaranya:

1. Retrospeksi

Kabupaten Sampang merupakan daerah yang secara Sumber Daya Manusia masih di kategorikan cukup rendah ketika disandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal pada pendidikan yang dianggap masih perlu untuk retrospeksi dengan harapan mampu mengevaluasi perkembangan pendidikan Kabupaten Sampang. Faktor utama dalam peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten

Sampang tidak terlepas dari seberapa besar anggaran yang di keluarkan dan bagaimana cara manajemen keuangan tersebut. Dalam permasalahan ini, perihal anggaran pendidikan Kabupaten Sampang akan stabil hanya dengan meningkatkan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang. Kemampuan manajerial anggaran juga cukup membantu menjaga stabilitas pengeluaran dengan cara membuat skala prioritas baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Restrukturisasi

Pada perihal peningkatan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas di bidang pendidikan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sampang. Berbicara urusan pendidikan bukan hanya berbicara Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melainkan harus melibatkan setiap kecamatan, desa, bahkan seluruh elemen masyarakat karena pendidikan bukan hanya milik personal.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang harus secara bertahap meninggalkan pola top down dan menerapkan pola top bottom dalam proses kebijakan pendidikan. Berbagai keputusan pendidikan hendaknya dimulai dan dikembangkan dengan mendorong keterlibatan konstruktif (constructive involvement) semua kelompok kepentingan (interest groups). Mereka perlu diberi ruang untuk memberikan kontribusinya dan mengekspresikan aspirasi pendidikan serta mempresentasikan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan hendaknya tidak di buat atas dasar pilihan, preferensi, kemauan dan kepentingan para pejabat pemegang otoritas kependidikan (authority based), tetapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di daerah (research based).

3. Rehabilitasi

Dalam upaya tercapainya suatu tujuan pendidikan, maka di perlukan suatu gambaran umum yang terdapat pada visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang belum memiliki titik fokus dalam melangkah dan menentukan program mendalam untuk periode kedepan. Hal ini di tunjukkan bahwa Dinas Pendidikan hanya mendapat poin pertama pada misi Kabupaten Sampang yakni "Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing" seperti yang penulis dapatkan pada sesi

wawancara dalam pengumpulan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Sehingga hal itu tidak menunjukkan kerincian langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing baik ditingkat regional maupun nasional. Karena Kabupaten Sampang memiliki kultur yang berbeda dengan daerah-daerah lain, sehingga dengan adanya spesifikasi yang mendalam dinas pendidikan dapat mengambil keputusan dengan bijak dan baik sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan. Dalam penunjang kualitas pendidikan juga tidak lepas dari bagaimana kompetensi seorang pendidik.

Membangun kesadaran diri dalam penerapan metode pendidikan yang ideal merupakan sarana paling efektif untuk membangkitkan motivasi anak didik di setiap tahapan proses pembelajaran di sekolah. Selama ini, anak didik hanya terkungkung oleh keberadaan guru, sementara metode yang digunakan sama sekali tidak menyentuh terhadap pengembangan kreatif anak didik.

Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam revitalisasi kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan juga mengenai faktor apa saja yang menjadi pendukung dan juga penghambat dalam proses peningkatan mutu Pendidikan. Dan juga dalam hal ini menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya revitalisasi Pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang. Bisa dilihat bahwasanya kondisi Pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang masih ada pada angka yang terbilang kurang. Dibawah ini merupakan faktor pendukung dan penghambat proses revitalisasi kebijakan Pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang.

1. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang ditemukan beberapa faktor pendukung upaya pemerintah dalam merevitalisasi kebijakan pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang dalam tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Dari hasil yang ada, melihat kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang yang masih masuk pada kriteria rendah. Hasil wawancara yang penulis dapatkan

a. Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang jelas

Sebagai acuan dari suksesnya suatu organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sampang, Dinas Pendidikan

juga mempunyai tujuan yang seharusnya menjadi tolak ukur pada 5 (lima) tahun kedepan. Salah satu yang menjadi acuan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagai suatu landasan pengembangan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Cita-cita tersebut kemudian dirumuskan menjadi tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang pasal 4 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Dari pandangan secara universal di atas, Dinas Pendidikan memiliki misi yaitu “mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Hal ini yang merupakan salah satu faktor pendukung dari terwujudnya revitalisasi pendidikan karena dari misi tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam mencapai tujuan tersebut.

b. Pengelolaan anggaran dalam manajemen pendidikan yang berprinsip akuntabilitas dan transparansi

Dalam keberlangsungan pendidikan yang bermutu tidak menutup kemungkinan bagaimana manajemen keuangan yang dilakukan. Hal ini di tegaskan pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan

2. Faktor Pendorong

Selain faktor pendukung dalam upaya revitalisasi kebijakan pendidikan, ada juga faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya revitalisasi kebijakan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang, diantaranya:

a. Disparitas kemampuan daerah

Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warganya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut tercermin pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN. Dari upaya pemerintah tersebut dalam proses peningkatan mutu pendidikan tidak selaras dengan apa yang terjadi pada daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terbelakang (3T) termasuk Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang masih terbelang cukup rendah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga mengakibatkan terhadap degradasi mutu pendidikan. Hal tersebut juga ditemukan penulis pada saat observasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa pendidikan kabupaten sampang dalam proses Indek Pembangunan Manusia (IPM) masih membutuhkan cukup banyak anggaran. Ketika tahap perencanaan program kerja untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dinas pendidikan membutuhkan 30 persen dari APBD tapi hal tersebut hanya bisa di realisasikan 20 persen sehingga dalam hal ini perbaikan pendidikan harus di mulai dari anggaran.

- b. Rendahnya partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat dari keberlangsungan peningkatan mutu pendidikan. Kecenderungan kehidupan dalam era globalisasi telah membawa berbagai perubahan yang berlangsung dengan cepat terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan segala dampaknya. Oleh karena itu, lingkungan dalam situasi global mulai terasa, antara lain lingkungan yang merangsang pemikiran majemuk, lingkungan yang memerlukan sumber daya manusia yang menguasai iptek, lingkungan yang menghormati seseorang yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan produktif, dan lingkungan yang lebih mengutamakan

masyarakat “meritokrasi”, yaitu masyarakat yang lebih menghargai prestasi daripada status dan asal-usul (Surya, 2000:4). Melihat kenyataan diatas, hal yang paling utama adalah pembentukan dan juga pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sedini mungkin secara terarah dan menyeluruh. Harus disadari bahwasanya sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pendidikan, apalagi dalam pendidikan negara berkembang seperti Indonesia hal ini menjadi unsur yang sangat menentukan. Dalam mendukung proses revitalisasi pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang dimana rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan masih terbelang rendah, beberapa upaya dilaksanakan seperti pemerataan pendidikan melalui pemerataan kesempatan kepada siapa saja untuk menempuh pendidikan. Akan tetapi hal ini juga tidak akan berjalan dengan lancar apabila kemauan dari masyarakatnya juga masih terbelang rendah. Dalam catatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, sejumlah 38.7% masyarakatnya masih belum tamat menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Maka dalam hal ini masih menjadi suatu persoalan yang besar dalam pendidikan di Kabupaten Sampang. Mengingat angka tersebut hampir menyentuh angka separuh dari masyarakatnya. Nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat atau yang dianut masyarakat akan berpengaruh pada kemajuan suatu pendidikan, terutama dalam sudut orang tua memandang nilai seorang anak. Nilai yang dimaksud disini merupakan hal-hal yang dianggap baik dan diyakini.

- c. Sarana-prasarana
Salah satu aspek yang seharusnya mendapatkan perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti: gedung, ruang kelas, ataupun media-media pendidikan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti: halaman, taman, maupun jalan menuju ke sekolah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, pemerintah

melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 8 mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat kerja, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dari 617 Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Sampang, tidak semua memiliki sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas penunjang pendidikan. Ruang kelas yang baik, perpustakaan, buku, Unit Kesehatan Sekolah dan Tempat Olahraga masih belum dimiliki oleh Sekolah Dasar. Dalam hal penunjang pembelajaran, sarana seperti tempat olahraga merupakan hal yang penting dalam prosesnya. Contoh lain yang paling mendasar adalah tersedianya buku pembelajaran sebagai media siswa dalam belajar. Maka dengan ini juga diperlukan pemerataan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung jalannya proses pendidikan dengan baik.

d. Mutu tenaga pendidik

Tenaga pendidik merupakan hal utama sebagai penunjang dari kemajuan suatu pendidikan, akan tetapi di sisi lain hal ini juga sebagai faktor penghambat kemajuan pendidikan. Hal ini dikarenakan kualitas seorang pendidik masih cukup rendah dan masih diperlukan pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang berbunyi “kedudukan guru sebagai tenaga profesional” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tanpa perbaikan kualitas guru maka peningkatan kualitas pendidikan masih

tetap berada di angan-angan. Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah baik skala lokal maupun nasional, tendensi tidak akan terwujud apabila guru bersifat pasif, statis, dan miskin kreatif dalam pengembangan potensi dan profesionalitas kerja, serta kurang didukung oleh pembinaan dari kepala sekolah, pengawas, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait. Syarif Yunus (2018) mengatakan bahwa persoalan guru memang tidak sederhana, namun juga tidak pula terlalu kompleks. Membahas kualitas guru, ada faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidik. Dalam konteks ini ada empat penyebab rendahnya kualitas pendidik, diantaranya yaitu: (1) Cara pandang guru tentang profesi. (2) Kualifikasi guru yang belum setara. (3) Program peningkatan keprofesian (4) Rekrutmen guru yang belum efektif.

Kesimpulan

Kondisi pendidikan kabupaten sampang sebelum di revitalisasi memang masih di katakan tradisional dan terbelakang, dimana seharusnya pendidikan tersebut yang mampu memberikan inovasi-inovasi baru terhadap perkembangan masyarakat. Dari peran pemerintahlah upaya revitalisasi kebijakan pendidikan tersebut mampu memberikan warna baru terhadap pendidikan. Dari penelitian dan pembahasan mengenai revitalisasi kebijakan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang meliputi anggaran pendidikan masih menjadi hal yang terpenting dari keberlangsungan pendidikan. Dari kekurangan anggaran tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang masih merasa kesulitan dalam mengurus pendidikan.

Selanjutnya ialah menciptakan alternatif baru sebagai perbaikan pemahaman masyarakat oleh dinas pendidikan yaitu dengan cara melakukan kerja sama baik dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun elemen masyarakat yang terkait. Namun hal ini masih menjadi lemah karena kurangnya antusias dari pemerintah itu sendiri. Dilanjutkan dengan peningkatan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang bagaimana pendidikan itu berjalan. Sehingga perlunya pengadaan, pemeliharaan, maupun inventaris harus lebih di maksimalkan.

Yang terakhir Pembangan mutu tenaga pendidik sangat memnentukan proses keberlangsungan pembelajaran. Gambaran masa depan seorang anak didik tergantung bagaimana seorang pendidik tersebut memberikan dan memfasilitasi pemikirannya. Sehingga sangat di perlukan pelatihan-pelatihan sebagai penunjang kreatifitas pendidik.

Daftar Pustaka

- Asari, Hasan. 1994. *Menyinggung Zaman Keemasan Islam*. Bandung : Mizan,.
- Beni Heldrianto, 2003: dalam jurnal *Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Anak Putus Sekolah dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*.
- Dheni Setiyawan, 2015. *Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Jombang*.
- Joze Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo
- M. Djumransjah, *Filsafat Pendidikan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004:22).
- Madjid, Abd. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad takdir ilahi, *Revitalisasi pendidikan berbasis moral*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2012:57)
- Paulo Freire, *pendidikan sebagai praktek pembebasan* (Jakarta: Gramedia 1984:35
- Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M. A. *Analisis Kebijakan dan formulasi kepenyusunan model-model implementasi kebijakan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2012
- Sri Hidayati Djoeffan, 2004. *Revitalisasi pendidikan sebagai paradigma peningkatan kualitas bangsa*. Volume XX No. 2 April – Juni 2004 : 219 – 233
- Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007:77
- Tabrani. ZA. 2013: *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah)*. Vol. 01, No. 02, Juli 2013